

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal di Provinsi Bali

**I Gusti Ngurah Putu Teguh Pratama¹
I Negah Kartika²**

^{1,2}Jurusan ekonomi pembangunan fakultaas ekonomi dan bisnis universitas
udayanan (unud), bali, indonesia
e-mail : ngurahteguh007@gmail.com / telp: +62 81238453064

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. Penelitian ini mencakup 9 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan SiLPA terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui Belanja Modal dengan nilai PAD terhadap Belanja Modal adalah 5,343 sig 0,00. SiLPA terhadap Belanja Modal adalah 2,916 dengan sig 0,004. PAD terhadap IPM sebesar 4,616 sig 0,00, SiLPA terhadap IPM sebesar 2,009 sig 0,048 dan Belanja Modal terhadap IPM sebesar 2,234 dengan sig 0,039.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), SiLPA, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of district own source revenue and financing surplus (SiLPA) on the Human Development Index (HDI) through Capital Expenditure in Bali Province. This study covers 9 districts / cities in the province of Bali. The purpose of this study is to determine the effect of local revenue and SiLPA on human development index through capital expenditure. The analysis technique used is path analysis. The result of research indicates that regional income and SiLPA have positive and significant influence to human development index through Capital Expenditure with PAD value toward Capital Expenditure is 5,343 sig 0,00. SiLPA to Capital Expenditure is 2,916 with sig 0.004. PAD to HDI of 4,616 sig 0,00, SiLPA to HDI of 2,009 sig 0,048 and Capital Expenditure to HDI 2,234 with sig 0,039.

Keywords: *district own source revenue, SiLPA, Human Development Indeks (HDI), Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, sehingga setiap negara memperhatikan laju pertumbuhan ekonominya. Perhatian tersebut ditandai dengan adanya penerapan kebijakan Otonomi Daerah, dimana kebijakan ini memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang ada. Menurut Undang-Undang no 32 tahun 2004, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009). Olatunji et al (2009) mengatakan bahwa pendapatan pemerintah daerah terutama berasal dari pajak.

Menurut Natasha Hamilton-Hart dan Günther G. Schulze (2016) Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sedikit pada pertengahan 2016 namun masih berada di bawah angka yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Terlepas dari berbagai reformasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, beberapa kebijakan memang buruk dan permasalahan implementasi masih tetap ada. Kontribusi sektor pengolahan telah turun, nilai tukar riil terapresiasi, nilai ekspor turun, dan pertumbuhan ekonomi mengalami tren penurunan. Sektor perbankan stabil meski tak efisien, ditandai dengan marjin bunga yang besar serta berbagai hambatan kompetisi. Proteksi perdagangan, khususnya

dalam komoditas makanan pokok, telah menciptakan biaya ekonomi tinggi yang terutama membebani orang miskin. Turunnya penerimaan pemerintah telah memberi tambahan tekanan pada anggaran negara, sekalipun pemerintah berusaha menambah belanja infrastruktur dan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas.

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi tujuh jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah dipisahkan menjadi dua jenis yang terdiri dari : 1). Pajak Kabupaten/Kota, 2). Pajak Provinsi. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

PAD diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda. Semakin tingginya PAD suatu daerah cenderung dapat mengurangi

tingkat ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan undang-undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Penentuan pajak untuk PAD ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan, namun masih sesuai dengan ketentuan undang-undang. Obyek pajak dan retribusi daerah sangat menentukan jumlah PAD, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila PAD meningkat dan kesejahteraan masyarakat daerah meningkat.

Menurut Blane D. Lewis (2006) Pemerintah daerah di Indonesia mengelola pajak secara tidak efisien. Biaya rata – rata administrasi perpajakan setempat sebagai persentase dari pendapatan yang dihasilkan diperkirakan lebih dari 50 persen. Namun ada variasi inefisiensi administratif yang luas pemerintah daerah. Estimasi model *frontier* biaya stokastik menunjukkan bahwa ketidak efisienan biaya administrasi meningkat secara signifikan sebagai transfer fiskal dari pusat kenaikan; investigasi juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang terpilih eksekutif tidak lebih efisien biaya operasional dibandingkan dengan yang ditunjuk kepala. Langkah-langkah inefisiensi yang sederhana dan kompleks sangat mirip mengenai hasil tingkat dan variasi inefisiensi di pemerintah daerah, namun dapat menawarkan perkiraan yang signifikan tentang inefisiensi relatif pemerintah daerah masing-masing. Hal ini menimbulkan dilema bagi pemerintah pusat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja administrasi perpajakan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Fajri, Arman Delis Dan Yohanes Vyn Amzar (2016) mengatakan pengaruh otonomi fiskal terhadap ketimpangan

wilayah di Sumatera berpengaruh negatif dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan keterbukaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Diharapkan pemerintah tingkat Provinsi di Sumatera mengoptimalkan PAD untuk mengatasi ketimpangan wilayah.

Penelitian yang dilakukan Peggy Hariawan Dan Ayu Swaningrum (2015) ditemukan angka PDRB per kapita dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif terhadap IPM. Kusuma Hendra (2016) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama dari kontribusi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hutajulu Halomoan dkk (2012) menunjukkan secara umum manajemen keuangan di Kabupaten Jayapura berjalan kurang efektif. Disamping itu nilai kontribusi neraca keuangan pada pendapatan nasional menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi dari perimbangan pendapatan.

Christian von Luebke (2009) berpendapat bahwa tekanan sisi permintaan dari perusahaan lokal, asosiasi dan dewan distrik kurang signifikan dari pada tekanan sisi penawaran dari pemimpin pemerintah daerah dalam menjelaskan variasi perpajakan, praktik perizinan dan praktik korupsi. Dalam transisi awal Indonesia menuju desentralisasi demokratis, tekanan masyarakat terkendala oleh masalah tindakan kolektif dan insentif politik yang sesat. Pemimpin pemerintah daerah, di sisi lain, memiliki kekuatan yang kuat dan insentif baru untuk reformasi kebijakan. Sebagai tanggapan terhadap debat tata pemerintahan yang baik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintah merupakan penentu

kebijakan yang penting, seringkali di bawah perkiraan, yang dapat mengkompensasi (atau memperparah) cek masyarakat yang lemah dalam transisi ekonomi.

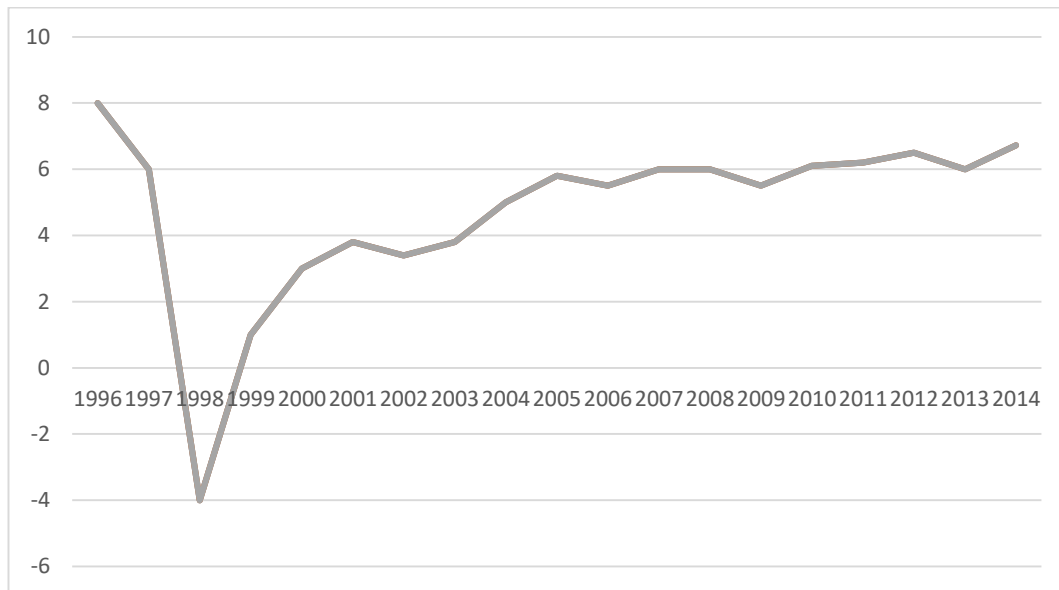
Penelitian yang dilakukan oleh Liliana *et al* (2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tausikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu, Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi. Permasalahan lain dalam pengalokasian anggaran adalah tidak diperhatikannya jangka waktu penetapan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan sebelum akhir tahun anggaran. Kondisi ini menjadi anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir, dan berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Khusnandar dan Siswanto (2012) yang meneliti 295 SKPD tahun 2010 mendapatkan bukti empiris bahwa SiLPA mempunyai signifikansi positif dengan alokasi belanja modal. Hasil penelitian berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan Purnama (2013) yang meneliti Pemkab/kota seluruh Jawa Tengah tahun 2011-2013 yang menghasilkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Minimnya penelitian terkait pengaruh SiLPA terhadap alokasi belanja modal membuat penulis tertarik untuk

meneliti hal tersebut. Menurut Kumorotomo (2010), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran.

Menurut Bank Indonesia (2007), kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Sejalan dengan pernyataan tersebut maka perlu adanya peningkatan kesempatan kerja yang nantinya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan pada akhirnya akan memberikan imbas pada peningkatan pendapatan masyarakat. Todaro dan Smith (2006) menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Laju pertumbuhan dikatakan mengalami peningkatan apabila setiap tahun tertentu lebih besar dari pada sebelumnya, hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.

**Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali
Tahun 1995-2014**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2015

Berdasarkan Gambar 1 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali mengalami fluktuasi. Pada tahun 1996 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali menempati tempat tertinggi yaitu 8 persen, sementara pada tahun 1998 Provinsi Bali mengalami kontraksi sehingga sebesar negatif 4 persen. Pada tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali perlahan kembali meningkat, walaupun beberapa kali mengalami penurunan yang tidak terlalu curam hingga tahun 2014 mencapai 6,72 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, sehingga besar kecilnya peningkatan maupun penurunan yang terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan nekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali datanya disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2007-2014

Kabupaten/kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jembrana	5.11	5.05	4.98	4.57	5.61	5.09	5.38	5.88
Tabanan	5.76	5.22	5.44	5.68	5.82	5.91	6.03	6.35
Badung	6.85	6.91	6.39	6.68	6.69	7.03	6.41	6.75
Gianyar	5.89	5.90	5.93	6.04	8.76	6.79	6.43	6.59
Klungkung	5.54	5.07	4.92	5.43	5.81	6.03	5.71	5.82
Bangli	4.48	4.02	5.71	4.97	5.84	5.99	5.61	5.67
Karangasem	5.20	5.07	5.01	5.09	5.19	5.73	5.81	5.85
Buleleng	5.82	5.84	6.01	5.85	6.11	6.52	6.71	6.73
Denpasar	6.60	6.83	6.53	6.57	6.77	7.18	6.54	6.77
Bali	5.92	5.97	5.33	5.83	6.49	6.65	6.05	6.72

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2015

Tabel 1 menyatakan selama kurun waktu 2007-2014, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali masih mengalami disparitas. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kabupaten/kota yang berada di wilayah Bali selatan memiliki angka pertumbuhan diatas angka pertumbuhan Bali, yang terdiri dari Denpasar, Badung, Gianyar. Pada tahun 2014, perekonomian Denpasar mampu mencapai 6,77 persen, kondisi pertumbuhan kabupaten kelungkung mencapai hanya mencapai 5,82 persen. Disparitas di Provinsi Bali masih terjadi, meskipun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali masih dapat tumbuh di tengah perlambatan perekonomian nasional dan dunia.

Menurut Inuwa (2012), perangkat penting dalam mengendalikan perekonomian adalah dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah, yaitu belanja modal. Kartika dan Dwirandra (2014), apabila suatu daerah memiliki saran dan prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. PP No. 58 tahun 2005 di sebutkan

bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Felix (2012) berpendapat bahwa pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Peningkatan anggaran belanja modal akan menyebabkan peningkatan belanja modal pada infrastruktur. Solikin (2007) menyatakan belum terorientasinya pengelolaan belanja modal pada publik menyebabkan alokasi belanja modal tidak terlaksana sepenuhnya bagi pemenuhan kesejahteraan publik.

Berdasarkan penelitian Kartika dan Dwirandra (2014), dapat diketahui bahwa PAD memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Semakin tingginya PAD, semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan daerah. PAD yang semakin bertambah diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Jones dan Walker (2007), menyatakan bahwa jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan

pemerintah daerah. Semakin tingginya jumlah *revenue* pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan daerah akan mengalami kesulitan keuangan dalam pendanaan infrastruktur bagi pembangunan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Walaupun kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan cenderung rendah dan masih terjadinya disparitas pendapatan antar daerah. Penelitian I Komang Oka Artana Yasa dan Sudarsana Arka (2015) bertujuan untuk mengetahui disparitas pendapatan antar daerah Provinsi Bali dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan disparitas pendapatan antar daerah Provinsi Bali tahun 2001-2012 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,29 artinya tingkat disparitas tergolong rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antar daerah. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah sebagai pemberi sumber pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiayaan bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dari pemerintah pusat yaitu bersumber dari APBN. Pemerintah

daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam hal ini sudah melakukan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disajikan pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2015

Kab/kota	Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (ribuan rupiah)						Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jembrana	570	816	1,020	1,061	1,135	1,470	1,012.00
Tabanan	880	958	1,073	1,186	1,336	1,499	1,155.33
Badung	880	1,070	974	1,140	1,137	1,256	1,076.17
Gianyar	823	882	967	932	1,112	1,220	989.33
Klungkung	1,118	1,231	1,251	1,300	1,848	1,489	1,372.83
Bangli	967	926	1,059	1,133	1,445	1,233	1,127.17
Karangasem	823	900	1,081	1,204	1,341	1,441	1,131.67
Buleleng	843	838	1,060	1,249	1,246	1,378	1,102.33
Denpasar	673	690	413	468	640	760	607.33
Bali	842	923	989	1,075	1,249	1,305	1,064.00

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2015

Rata-rata pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2010-2015 di bidang pendidikan, Kabupaten Kelungkung adalah yang tertinggi sebesar Rp. 1.372.830 disusul oleh Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 1.155.330, Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 1.131.670, Kabupaten Bangli sebesar Rp. 1.127.170, Kabupaten buleleng Rp. 1.102.330, Kabupaten Badung Rp. 1.076.170, Kabupaten Jembrana Rp. 1.012.000, Kabupaten Gianyar sebesar 989.330 dan yang terkecil adalah Kota Denpasar sebesar Rp. 607.330.

Modal sumber daya manusia (human capital) merupakan bentuk modal tak berwujud yang meliputi keahlian dan pengetahuan yang dimiliki pekerja atau diresap melalui pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan jasa yang bernilai bagi suatu perusahaan dari waktu ke waktu (Case, 2007). Untuk mengukur dimensi

pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Untuk mengukur tingkat pengetahuan proses perhitungannya, indikator rata-rata lama sekolah digabungkan dengan indikator melek huruf.

Tabel 3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2015

Kab/kota	Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (ribuan rupiah)						Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jembrana	230	284	338	392	400	435	346.50
Tabanan	272	328	414	455	523	567	426.50
Badung	255	438	362	774	538	587	492.33
Gianyar	225	218	289	328	393	475	321.33
Klungkung	333	387	496	812	798	665	581.83
Bangli	268	334	343	371	568	467	391.83
Karangasem	125	302	325	296	345	380	295.50
Buleleng	170	188	262	197	446	490	292.17
Denpasar	231	272	220	269	269	310	261.83
Bali	2,109	2,751	3,049	3,894	4,280	4,376	3,409.83

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2015

Rata-rata pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2010-2015 di bidang Kesehatan, Kabupaten Klungkung adalah yang tertinggi sebesar Rp. 581.830 disusul oleh Kabupaten Badung sebesar Rp. 492.330, Kabupaten Tabanan Rp. 426.500, Kabupaten Bangli sebesar Rp. 391.830, Kabupaten Jembrana Rp. 346.500, Kabupaten Gianyar sebesar 321.330, Karangasem sebesar Rp. 295.500, Kabupaten Buleleng Rp. 292.170, dan yang terkecil adalah Kota Denpasar sebesar Rp. 261.830.

Meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan (*equity*), produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kesinambungan (*sustainability*) (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014).

**Tabel 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru
Perkabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2015**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27
Jembrana	66.70	67.53	67.94	68.39	68.67	69.66
Tabanan	70.68	71.35	71.69	72.31	72.68	73.54
Badung	75.84	76.66	77.26	77.63	77.98	78.86
Gianyar	71.45	72.50	73.36	74	74.29	75.03
Kelungkung	66.01	67.01	67.64	68.08	68.30	68.98
Bangli	63.43	63.87	64.53	65.47	65.75	66.24
Karangasem	60.58	61.60	62.95	63.70	64.01	64.68
Buleleng	66.98	67.73	68.29	68.83	69.19	70.03
Denpasar	79.19	79.77	80.45	81.32	81.65	82.24

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2015

Selama kurun waktu 2010-2015 nilai IPM di Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan dari angka 70,10 di tahun 2010 hingga 73,27 di tahun 2015. Pelaksanaan desentralisasi dalam mencapai keberhasilan otonomi daerah tentunya mengharapkan terwujudnya suatu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Sebagai indikator tunggal IPM merupakan alat ukur yang dapat dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, sekaligus mengukur keberhasilan usaha pemberdayaan kemampuan sosial dan ekonomi penduduk wilayah tersebut.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa indikator tingkat kesejahteraan yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan masyarakat antar daerah. Saat ini penggunaan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari sisi daya beli, kesehatan maupun pendidikan (Nehen, 2012:82).

Yovita dan Utomo (2011) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Sementara itu Setyowati dan Suparwati (2012) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap indeks pembangunan manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel *intervening* pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja

modal. Pengalokasian anggaran belanja modal juga terbukti berpengaruh positif terhadap IPM.

Sementara itu SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah di teliti oleh Ardhini (2011) dengan objek penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah dengan hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal. Sementara itu penelitian Kartika dan Dwirandra (2014) tentang pengelolaan PAD dan SiLPA dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau dikenal SiLPA berpengaruh terhadap tingkat kinerja pelayanan publik. SiLPA tahun anggaran sebelumnya bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan alokasi belanja langsung maupun belanja modal untuk pembangunan daerah.

Provinsi Bali sebagai salah satu daerah yang ada di Indonesia dan ikut melaksanakan otonomi daerah, sangat serius mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dalam lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan, dimana peningkatan ini tidak terlepas dari peranan berbagai sektor ekonomi yang ada di Provinsi Bali. Laju pertumbuhan yang semakin meningkat, laju kesempatan kerja di Provinsi Bali juga mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Fenomena yang terjadi masih terdapatnya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, dan SiLPA terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 1). untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah Dan SiLPA terhadap Belanja Modal Di Provinsi Bali. 2). Untuk Menganalisis Pendapatan Asli Daerah, SiLPA Dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali. 3). Untuk Menganalisis Pendapatan Asli Daerah Dan SiLPA terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini didasarkan pada data kuantitatif atau temuan-temuan yang dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi (Sugiyono, 2013:12). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma asosiatif. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali. Sasaran penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dan SiLPA terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) melalui belanja modal. (BPS) masing-masing kabupaten/kota di Bali periode 2006-2014. Data-data yang diperoleh langsung dari pustaka tercetak yang ada pada Bappeda dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan beberapa variabel yaitu pengaruh langsung pendapatan asli daerah dan SiLPA terhadap belanja modal, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia, pengaruh langsung belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia, dan pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan SiLPA terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal di Provinsi Bali. Obyek dari penelitian ini adalah

indekks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan asli daerah, SiLPA, dan belanja modal.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM). indeks pembangunan manusia (IPM) yaitu suatu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, daya beli masyarakat. IPM digunakan untuk mengklarifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup pada Provinsi Bali, dalam persen.

Pendapatan asli daerah dan SiLPA di Provinsi Bali merupakan Variabel bebas dalam penelitian. Pendapatan yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah pada Provinsi Bali. Sektor pendapatan asli daerah berumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pajak premium, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang dihitung dalam ribuan rupiah. Sedangkan SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk mebiayai anggaran tahun berikutnya dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di Provinsi Bali, dalam ribuan rupiah.

Belanja modal di Provinsi Bali merupakan variabel intervening dalam penelitian. Belanja modal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah pada Provinsi Bali, dalam ribuan rupiah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder. Data skunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Metode ini sering disebut metode pengumpulan dokumen karena peneliti secara tidak langsung memperoleh data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain. Data sekunder digunakan dengan alasan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk memperolehnya secara langsung. Data dan informasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Bali.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Pada tahap analisis, data diolah dan diproses menjadi kelompok-kelompok, diklasifikasikan, dikategorikan dan dimanfaatkan untuk memperoleh kebenaran sebagai jawaban dari masalah dalam hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan ini bermaksud untuk mengungkapkan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel bebas atau *independent variable* dengan variabel terikat atau *dependent variable*. Dalam statistika, metode analisis yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah analisis jalur (*path analysis*) dan pengolahan data menggunakan program *SPSS*. Variabel terikat dipengaruhi oleh

beberapa variabel bebasnya, dan antara variabel bebas terdapat hubungan. Koefisien jalur merupakan besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat dan diberi simbol ρ_{XY} . Besarnya pengaruh dari X terhadap Y dinyatakan oleh besarnya nilai numerik koefisien jalur yaitu ρ_{YX} . Koefisien jalur dilihat dengan membuat persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- Y_2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Y_1 = Belanja Modal
- X_2 = SiLPA
- X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b_1 - b_5 = Koefisien regresi
- e_1 - e_2 = error term, nilai kesalahan observasi diasumsi

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Statistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X₁	81	9413110,00	2722625563,00	251202916,259	470996665,5
X₂	81	2612207,00	888201986,00	97423640,5432	153064273,7
Y₁	81	30942701,00	888201986,00	134570341,938	1444730344,1
Y₂	81	60,58	81,65	70,7263	4,69824
Valid N (listwise)	81				

Sumber : Lampiran 8 Hasil Olahan SPSS, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Pendapatan asli daerah (X_1) menunjukkan nilai minimum adalah Rp 9.413.110 (dalam ribu rupiah) dan nilai maksimumnya adalah Rp 2.722.625.563 (dalam ribu rupiah). *Mean* untuk pendapatan asli daerah adalah Rp 251.202.916,25 (dalam ribu rupiah), hal ini berarti rata-rata pendapatan asli daerah sebesar Rp 251.202.916,25. Standar deviasinya 470996665,5. 2). SiLPA (X_2) menunjukkan nilai minimum adalah Rp 2.612.207 (dalam ribu rupiah) dan nilai maksimumnya adalah Rp 888.201.986 (dalam ribu rupiah). *Mean* untuk SiLPA adalah Rp 97.423.640,54 (dalam ribu rupiah), hal ini berarti rata-rata SiLPA sebesar Rp 97.423.640,54. Standar deviasinya 153064273,7. 3). Belanja modal (Y_1) menunjukkan nilai minimum adalah Rp 42.701 (dalam ribu rupiah) dan nilai maksimumnya adalah Rp 888.201.986 (dalam ribu rupiah) . *Mean* untuk belanja modal adalah Rp 134.570.341,93, hal ini berarti rata-rata belanja modal sebesar Rp 134.570.341,93 (dalam ribu rupiah). Standar deviasinya 144730344,1. 4). IPM (Y_2) menunjukkan nilai minimum adalah 60,58 dan nilai maksimumnya adalah 81,65. *Mean* untuk IPM adalah 70,72, hal ini berarti rata-rata IPM sebesar 70,72. Standar deviasinya 4,69.

Pengaruh langsung dinyatakan dengan koefisien ρ_i dan digunakan untuk Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien *path*. Di dalam analisis jalur, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dapat dihitung dengan membuat perhitungan tersendiri. Untuk pendugaan parameter dilakukan dengan analisis regresi melalui *software SPSS 15.0 for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

Substruktur 1:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(14)$$

Dari hasil perhitungan pada pengujian data diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 6 Coefficients Substruktur 1

coefficients^a					
Model	Unstandardize Coefficients		Standardize Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,249	,376		13,979	,000
X ₁	,295	,055	,601	5,343	,000
X ₂	,053	,018	,097	2,916	,004

Sumber : Lampiran 5 Hasil Olahan SPSS

a. Dependent Variabel : Y₁

Substruktur 2 :

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2$$

Dari hasil perhitungan pada pengujian data diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7 Coefficients Substruktur 2

coefficients^a					
Model	Unstandardize Coefficients		Standardize coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,546	,077		20,014	,000
X ₁	,033	,007	,638	4,616	,000
X ₂	,014	,007	,239	2,009	,048
Y ₁	,018	,012	,173	2,234	,039

Sumber : Lampiran 6 Hasil Olahan SPSS

b. Dependent Variabel : Y_2

Berdasarkan hasil olahan data perhitungan terhadap substruktur 1, dan 2, dapat dijelaskan besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antar variabel. Perhitungan pengaruh antar variabel adalah sebagai berikut.

Pengaruh langsung (*Direct effect / DE*). Hasil analisis jalur variabel pendapatan asli daerah, SiLPA dan belanja modal terhadap IPM dilihat dari nilai beta atau *Standardized Coefficient* adalah sebagai berikut:

Pengaruh variabel pendapatan asli daerah (X_1) terhadap belanja modal (Y_1)
 $X_1 \longrightarrow Y_1 = 0,601$

Pengaruh variabel SiLPA (X_2) terhadap belanja modal (Y_1)
 $X_2 \longrightarrow Y_1 = 0,097$

Pengaruh variabel pendapatan asli daerah (X_1) terhadap IPM (Y_2)
 $X_1 \longrightarrow Y_2 = 0,638$

Pengaruh variabel SiLPA (X_2) terhadap IPM (Y_2)
 $X_2 \longrightarrow Y_2 = 0,239$

Pengaruh variabel belanja modal (Y_1) terhadap IPM (Y_2)
 $Y_1 \longrightarrow Y_2 = 0,173$

Pengaruh tidak langsung (*Indirect effect / IE*). Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA terhadap IPM melalui Belanja Modal

$$X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 = (0,665 \times 0,479) = 0,318$$

$$X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 = (0,496 \times 0,479) = 0,237$$

Pengaruh total (*Total effect*).

Pengaruh total = pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung

$$\text{Pengaruh total belanja modal} = 0,665 + 0,496 = 1,161$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh total IPM} &= 0,638 + 0,479 + 0,239 + 0,318 + 0,237 \\ &= 1,911 \end{aligned}$$

Persamaan struktural untuk model penelitian ini adalah :

Substruktur 1:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1$$

$$Y = 0,601 X_1 + 0,097 X_2 + e$$

$$\text{Pengaruh error (Pei)} = \sqrt{1-R^2}$$

$$\text{Pei} = \sqrt{1-0,448} = \sqrt{0,552} = 0,742$$

Substruktur 2:

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2$$

$$Y_2 = 0,638 X_1 + 0,239 X_2 + 0,173 Y_1 + e$$

$$\text{Pengaruh error (Pei)} = \sqrt{1-R^2}$$

$$\text{Pei} = \sqrt{1-0,398} = \sqrt{0,602} = 0,775$$

Pemeriksaan validasi model.

Ada dua indikator untuk melakukan pemeriksaan validitas model, yaitu koefisien determinasi total dan *theory trimming* dimana hasilnya dapat disajikan sebagai berikut.

Hasil koefisien determinasi total :

$$R^2_m = 1 - (0,552)^2 - (0,602)^2$$

$$R^2_m = 1 - 0,136$$

$$R^2_m = 0,667$$

Koefisien determinasi total sebesar 66,7 persen variasi dari IPM dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk, sedangkan sisanya yaitu 33,3 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang terbentuk (tidak terdapat dalam model) dan *error*.

Theory Trimming

Pendekatan ini dilakukan dengan membuang jalur-jalur yang non signifikan agar memperoleh model yang benar-benar didukung oleh data empirik. Uji validasi pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan regresi, menggunakan nilai p dari uji t yaitu pengujian koefisien regresi variabel dibakukan secara parsial dengan nilai X_1 terhadap Y_1 adalah 5,343 sig 0,00. X_2 terhadap Y_1 adalah 2,916 dengan sig 0,004. X_1 terhadap Y_2 sebesar 4,616 sig 0,00, X_2 terhadap Y_2 sebesar 2,009 sig 0,048 dan Y_1 terhadap Y_2 sebesar 2,234 dengan sig 0,039.

Analisis Regresi Variabel Mediasi Dengan Metode Uji Sobel

Untuk menguji variabel mediator yang memediasi hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dapat dilakukan tahapan sebagai berikut:

Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM melalui belanja modal

$$a = 0,295$$

$$sa = 0,05$$

$$b = 0,018$$

$$sb = 0,012$$

Menghitung nilai S_{ab}

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(0,0003 * 0,000149) + (0,087 * 0,00014) + (0,0025 * 0,000144)}$$

$$S_{ab} = 0,00037$$

Menghitung nilai ab

$$ab = 0,295 \times 0,018$$

$$ab = 0,0053$$

Menghitung nilai Z

$$Z = \frac{ab}{Sab}$$

$$Z = \frac{0,00531}{0,00037}$$

$$Z = 14,35$$

Menentukan Z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,96

Membandingkan Z hitung (14,35) dengan Ztabel (1,96)

Kesimpulan bahwa belanja modal dapat memediasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan IPM

Pengaruh tidak langsung SiLPA daerah terhadap IPM melalui belanja modal

$$a = 0,053$$

$$sa = 0,018$$

$$b = 0,018$$

$$sb = 0,012$$

Menghitung nilai S_{ab}

$$Sab = \sqrt{b^2 sa^2 + a^2 sb^2 + sa^2 sb^2}$$

$$Sab = \sqrt{(0,0003 * 0,000289) + (0,0029 * 0,000144) + (0,000324 * 0,000144)}$$

$$Sab = 0,0000745$$

Menghitung nilai ab

$$ab = 0,053 \times 0,018$$

$$ab = 0,00094$$

Menghitung nilai Z

$$Z = \frac{ab}{Sab}$$

$$Z = \frac{0,00094}{0,000074}$$

$$Z = 12,79$$

Menentukan Z tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 1,96

Membandingkan Z hitung (12,79) dengan Ztabel (1,96)

Kesimpulan bahwa belanja modal dapat memediasi hubungan antara SILPA dengan IPM.

Uji Hipotesis

Pengaruh masing-masing variabel secara parsial sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

$H_1 : \beta_1 > 0$ Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal

Dengan kriteria uji sebagai berikut:

Jika $\text{sig } t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika $\text{sig } t > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sebesar $0,000 < 0,05$.

Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain terdapat pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh SiLPA terhadap belanja modal

$H_0 : \beta_2 = 0$ SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

$H_1 : \beta_2 > 0$ SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dengan kriteria uji sebagai berikut.

Jika $\text{sig } t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika $\text{sig } t > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk

variabel SiLPA terhadap belanja modal sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain terdapat SiLPA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap IPM

$H_0 : \beta_3 = 0$ Tidak ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap IPM

$H_1 : \beta_3 > 0$ Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Dengan kriteria uji sebagai berikut.

Jika $\text{sig } t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika $\text{sig } t > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel pendapatan asli daerah terhadap IPM sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pengaruh SiLPA terhadap IPM

$H_0 : \beta_4 = 0$ Tidak ada pengaruh SiLPA terhadap IPM.

$H_1 : \beta_4 > 0$ SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Dengan kriteria uji sebagai berikut.

Jika $\text{sig } t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika $\text{sig } t > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel SiLPA terhadap IPM sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain SiLPA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap IPM melalui belanja modal

$H_0 : \beta_6 = 0$ Tidak ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap IPM melalui belanja modal.

$H_1 : \beta_6 > 0$ Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui belanja modal.

Dengan kriteria uji sebagai berikut.

Jika $\text{sig } t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika $\text{sig } t > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel pendapatan asli daerah terhadap IPM. Membandingkan Z hitung (14,3) dengan Ztabel (1,96) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui belanja modal.

Pengaruh SiLPA terhadap IPM melalui belanja modal

$H_0 : \beta_7 = 0$ Tidak ada pengaruh SiLPA terhadap IPM melalui belanja modal.

$H_1 : \beta_7 > 0$ SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui belanja modal.

Dengan kriteria uji sebagai berikut.

Jika $\text{sig } t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Jika $\text{sig } t > 0,05$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian untuk variabel pendapatan asli daerah terhadap IPM. Membandingkan Z hitung (14,3) dengan Ztabel (1,96) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan kata lain SiLPA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5 persen terhadap belanja modal Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berarti pendapatan asli daerah yang semakin tinggi maka akan meningkatkan belanja modal Kabupaten/kota di Provinsi Bali. SiLPA mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5 persen terhadap belanja modal Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berarti SiLPA dapat meningkatkan belanja modal Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 5 persen terhadap IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berarti pendapatan asli daerah yang semakin tinggi maka akan meningkatkan IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali. SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 5 persen terhadap IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berarti SiLPA dapat meningkatkan IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh tidak langsung Pendapatan asli daerah terhadap IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali lebih besar dari pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berarti belanja modal dapat memperbesar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap IPM. Pengaruh tidak langsung SiLPA terhadap IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali lebih besar dari pada pengaruh langsung SiLPA terhadap IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berarti bahwa belanja modal dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan IPM.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bali harus lebih memperhatikan anggaran yang di keluarkan. Anggaran yang di keluarkan baik disektor pendidikan maupun di sektor kesehatan sebaiknya dapat terdistribusi dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan tingkat pendidikan yang merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan, dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat yang lebih tinggi. Jika semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan bangsa. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan harus meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai hal tersebut dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Ardhini.2011.Pengaruh Rasio Keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah). *Skripsi*, Univeritas Diponegoo, Semarang.

Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16494>>. Date accessed: 11 sep. 2017. *Vol. 8, No. 1, pp: 1-112*

Badan Pusat statistik. 1995-2014. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali.

Badan Pusat Statistik. 2007-2014. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.

Badan Pusat Statistik. 2010-2015. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Bali.

Bank indonesia. 2007. Indikator Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Dan Tingkat Pengangguran.

Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Litbang NTT, IV-03*

Blane D. Lewis (2006) Local government taxation: An analysis of administrative cost inefficiency, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 42 [2], 213-233

Case, Karl E. dan Ray, C Fair. 2007. Indikator Dimensi Pengetahuan Penduduk. Edisi Kelima. Jakarta: PT. Indeks.

Christian von Luebke (2009) The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 45[2], 201-230

Darwanto dan Yustikasari, 2007, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", *E-article* Simposium Nasional Akuntansi, 26-28 Juli 2007, Makasar.

DJPK Kemenkeu. 2015. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2010-2015.

DJPK Kemenkeu. 2015. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Di Kesehatan Pendidikan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2010-2015.

- Fajri, Muhammad; Delis, Arman; Amzar, Yohanes Vyn. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], jan. 2017. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/27422>>. Date accessed: 11 sep. 2017. *Vol. 9, No. 2, pp: 99 – 107*
- Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta: Penerbit UPPAMPYKPN, 2008.
- Hariwan, Peggy; Swaningrum, Ayu. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/16496>>. Date accessed: 11 sep. 2017. *Vol. 8, No. 1, pp: 72-82*
- Hutajulu, Halomoan; Sanggrangbano, Agustina; Bonay, Antonia K. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], oct. 2012. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/1903>>. Date accessed: 12 sep. 2017. *Vol. 5, No. 2, pp:79-150*
- Inuwa, Nasiru. 2012. Government expenditure and economic growth in Nigeria : cointegration analysis and causality testing. *Academic research international*. 2(3):pp: 718-723.
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. Explanators of local Government Distress. *ABACUS*. 43(3): 396-418.
- Kartika dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Vol 7, No.1, April 2014*.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2010. Akuntabilitas anggaran publik: isu politik, prioritas belanja dan silpa dalam alokasi APBD di beberapa daerah. Makalah Dipaparkan Pada Konferensi Administrasi Negara Ke-3, Bandung.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

- Kusreni, Sri & Suhab, Sultan. 2009. Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *DIE – Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Vol. 5 No. 3, April 2009*.
- Kusuma, Hendra. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], July 2016. ISSN 2303-0186. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/22735>>. Date accessed: 11 Sep. 2017. *Vol. 9, No. 1, pp: 1-92*
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Penerimaan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana and Comaniciu Carmen. 2011. Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?. *International Journal of Arts & Sciences*, pp: 241-254.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2001. *Ekonomi publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Mawarni, Darwanis, Abdullah Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Kabupaten Dan Kota di Aceh. *Vol.2 No.2, Mei. Pages 80-90*.
- Natasha Hamilton-Hart & Günther G. Schulze (2016) Taxing Times in Indonesia: The Challenge of Restoring Competitiveness and the Search for Fiscal Space, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 52 [3], 265-295
- Nehen, I.K. 2012. Pembangunan Manusia Bagi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Dari Sisi Daya Beli, Kesehatan Dan Pendidikan. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Udayana University Press.
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria.

International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 11, pp: 172-182.

- Olatunji, O.C., O. Asaolu Taiwo and J.O. Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management, Vol.3, Issue 3, pp: 54-60.*
- Pambudi, Septian Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Bogor : IPB Bogor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purnama, Arif. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012- 2013. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putro, Nugroho S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rahyuda. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Universitas Udayana-Press.
- Sentosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan bisnis. Vol. 5, no. 2 juli 2013.*
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. Analisis Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 4, No. 2, Hal. 211-228. Desember 2007*
- Setyowati dan suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD, terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. *Jurnal Prestasi. Vol. 9 No. 1-juni-2012.*
- Situngkir, Anggiat, 2009, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pengkab Sumatera Utara. *Tesis*, Medan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

- Solikin, Ikin. 2008. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat. *E-jurnal akuntansi pemerintah*. 2(2):h:1-12.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No. 2 Desember 2010.
- Suryana Utama, 2007. *Analisis Jalur (Path Analysis)*. Buku Ajaran Denpasar : Sastra Utama.
- Swasono, 2005, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Perkumpulan Pra Karsa, Jakarta April 2005.
- Todaro dan smith. 2006. *Pertumbuhan Ekonomi* di dunia ketiga. Jakarta : PT erlangga (terjemahan).
- Triyanto, Danang; Wahyudi, Setyo Tri; Ananda, Candra Fajri. The Effect of Capital Expenditure on Local Revenue: Study In East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10, No. 2, agustus 2017
- Umar, Husein, 2005, *Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam pemasaran*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Victor, Pekpekai. 2003. Peranan Anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Provinsi Papua 1990 – 1999). *Tesis S-2*. Program Pascasarjana. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Tidak dipublikasikan.
- Yovita, Farah Marta dan Dwi Cahyo Utomo. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2008 -2010. *Jurnal akuntansi*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Yusuf, Ahmad. 2014. Pengaruh Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perkembangan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.